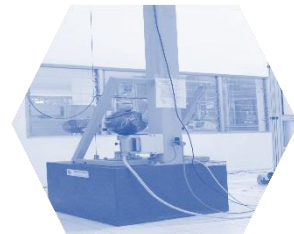




**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA KINERJA TAHUN 2024 (REVISI) BBSPJIKKP



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin adanya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kinerja merupakan dokumen yang berisi target kinerja yang diharapkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dan disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memiliki tujuan untuk membangun manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Dokumen Rencana Kinerja 2024 disusun pada awal tahun sebelum tahun anggaran berjalan untuk digunakan sebagai dasar perencanaan. Setelah ditetapkannya Peraturan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 185 Tahun 2023 pada tanggal 27 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian Nomor 280 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021-2024 maka dilakukan reviu Renkin terkait adanya perubahan indikator kinerja Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021-2024 dan reviu terhadap Perjanjian Kinerja TA 2023.

Kami berharap agar Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024 ini dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) pada tahun anggaran 2024 dan dijadikan dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun pelaksanaan.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, November 2023

Kepala,



Hagung Eko Pawoko

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
D. Ruang Lingkup.....	4
BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.....	6
A. Hasil-Hasil Pembangunan.....	6
B. Arah Pembangunan.....	9
BAB III RENCANA KINERJA.....	12
A. Sasaran.....	12
B. Indikator Kinerja.....	21
BAB IV PENUTUP.....	23
LAMPIRAN	
A. Formulir Rencana Kinerja 2024	
B. Matriks Keterkaitan Aktivitas Utama dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	
C. Matris Kinerja dan Pendanaan BBSPJIKKP TA 2024	

## DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 2.1	Perkembangan Peningkatan Kapabilitas Hasil Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri TA 2019-2023.....	6
Tabel 2.2	Rincian Kegiatan Kolaborasi BBSPJIKKP TA 2019-2023.....	7
Tabel 2.3	Hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP TA 2019-2023.....	8
Tabel 2.4	Perbandingan Capaian Peningkatan Efisiensi Perusahaan Industri Yang Memanfaatkan Produk Inovasi/Paten Hasil Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi TA 2019-2021.....	9
Tabel 2.5	Perkembangan Produktivitas/Efisiensi Perusahaan Industri Yang Telah Memanfaatkan Teknologi Industri Melalui Jasa Konsultansi DAPATI TA 2022-2023.....	9
Tabel 2.6	Rincian Kegiatan DAPATI TA 2022-2023 .....	10
Tabel 2.7	Realisasi PNBP BBSPJIKKP TA 2018-2023 .....	11
Tabel 2.8	Jumlah Pelanggan TA 2017 – 2021 .....	11
Tabel 2.9	Volume Layanan Jasa BBSPJIKKP Tahun 2018-2023 .....	12
Tabel 3.1	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung.....	19
Tabel 3.2	Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran .....	22
Tabel 3.3	Rencana Kegiatan dan Anggaran BBSPJIKKP TA 2023.....	26
Tabel 3.4	Perjanjian Kinerja TA 2024 .....	28

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik (good governance), maka suatu organisasi pemerintahan wajib menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi. Untuk mendukung penerapan asas tersebut, maka diperlukan perencanaan program kerja yang tepat dan terencana sehingga kinerja organisasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Presiden mewajibkan setiap penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan diawali oleh suatu perencanaan strategis yang dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 (lima) tahunan. Renstra organisasi kemudian diturunkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan yang kemudian diaplikasikan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja dan Anggaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) Menyusun Rencana Kinerja (RENKIN) Tahun 2024. Rencana Kinerja merupakan sebuah janji komitmen suatu instansi yang akan dicapai dalam tahun tertentu. Rencana Kinerja ini berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pedoman yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2024 adalah Peraturan Menteri Perindustrian No. 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud penyusunan Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja BBSPJIKKP
2. Sebagai kontrak atau kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan BBSPJIKKP pada tahun 2024
3. Memudahkan dalam menilai keberhasilan/kegagalan atas target kinerja yang telah ditetapkan

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

### **• Dasar Hukum Tupoksi**

1. Permenperin No. 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian
2. Peraturan Menteri Perindustrian No. 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI

### **• Tugas Pokok**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik (BBSPJIKKP) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Kebijakan dan Jasa Industri (BSKJI). Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022, BBSPJIKKP mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBSPJIKKP menyelenggarakan fungsi :

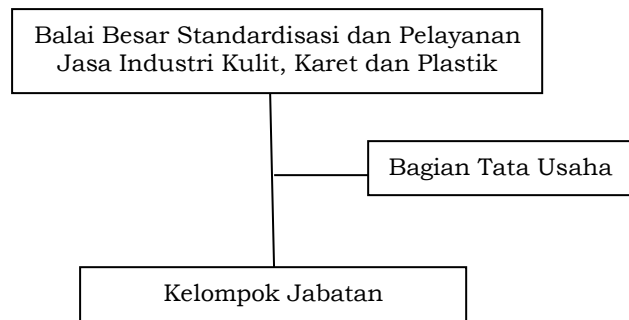
- a. Pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kulit, karet, dan plastik;
- b. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- c. Pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- d. Pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- e. Pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kulit, karet, dan plastik;
- f. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kulit, karet, dan plastik;
- g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan dan rumah tangga; dan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

#### **D. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Permenperin No 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BSKJI, struktur organisasi BBSPJIKKP terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi BBSPJIKKP ditunjukkan pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BBSPJIKKP

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Adapun kelompok jabatan fungsional di BBSPJIKKP antara lain Penguji Mutu Barang (PMB), Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), Pembina Industri (PI), Pranata Hubungan Masyarakat, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Perencana, Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, Analis Kepegawaian, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, dan Arsiparis yang mendukung tugas dan fungsi BBSPJIKKP.



### **E. Ruang Lingkup**

Batasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kinerja TA 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kinerja ini disusun untuk Tahun Anggaran 2024
2. Unit-unit yang termasuk dalam Renkin BBSPJIKKP Tahun 2024 adalah Bagian dan fungsi-fungsi di lingkungan BBSPJIKKP.

## **BAB II**

### **PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### **A. Hasil-Hasil Pembangunan**

Tugas pokok BBSPJIKKP adalah melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kulit, karet dan plastik. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, BBSPJIKKP memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kajian-kajian di bidang kulit, karet dan plastik. Berdasarkan tupoksi BBSPJIKKP, maka secara umum hasil dari pelaksanaan kegiatan di BBSPJIKKP adalah sebagai berikut:

##### **1. Standarisasi Industri**

Kementerian Perindustrian memberikan tugas kepada BBSPJIKKP untuk melaksanakan penyusunan rekomendasi, penerapan dan pengawasan standardisasi industri. Kegiatan penyusunan rekomendasi berupa penyiapan konsep/Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), baik berupa konsep baru maupun revisi. Selain itu BBSPJIKKP juga berperan aktif dan menjadi anggota komite teknis dalam pembahasan konsep RSNI bidang kimia dan kemasan yang disusun/direvisi dan dalam diskusi pembahasan petunjuk teknis pemberlakuan SNI wajib. Untuk menunjang penerapan standardisasi, BBSPJIKKP Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) dan laboratorium pengujian untuk memastikan SNI diterapkan dalam industri. BBSPJIKKP juga melakukan pengawasan standardisasi terhadap industri baik dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis dan atau pedoman tata cara yang berlaku. Pada pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

## 2. Pemanfaatan Teknologi Industri dan Industri 4.0

### a. Kolaborasi dalam rangka pengembangan industri

Kolaborasi merupakan faktor utama untuk membentuk ekosistem inovasi dalam pemecahan masalah dalam industri. BBSPJIKKP selalu berupaya untuk mendorong ekosistem inovasi melalui kolaborasi lintas sektor, diantaranya melibatkan pihak pemerintah (termasuk balai/pusat lain di Kemenperin), akademisi, dan/atau pelaku industri. Perkembangan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri selama TA 2021-2023 ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 2.1. Perkembangan peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri TA 2019-2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	2 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	1 kegiatan kolaborasi	2 kegiatan kolaborasi

Pada tahun 2019 terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pemanfaatkan teknologi penentuan umur simpan (masa kadaluarsa) Resiprene-35 dan teknologi peningkatan kecerahan Resiprene-35 kolaborasi dengan PT. Industri Karet Nusantara (IKN), dan penggunaan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan Ruang Eks Pengering BrCr di Kebun Merbuh untuk Peternakan Ayam Closed House dikaitkan dengan Sistem Manajemen Lingkungan kolaborasi dengan PTPN IX. Pada tahun 2020 terdapat 2 kegiatan kolaborasi berupa problem solving yaitu Pembuatan Prototype Rubber Dumper Jok Mobil untuk Difabel kolaborasi dengan PT. YPTI dan Penanganan limbah cair kolaborasi dengan UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan. Pada tahun 2021 terdapat 1 kegiatan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Kepulauan Sula terkait Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor.

Pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kegiatan kolaborasi dengan PT YPTI terkait Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel.

Rincian kegiatan kolaborasi Tahun 2019-2023 ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 2.2. Rincian Kegiatan Kolaborasi BBSPJIKKP TA 2019-2023

No	Tahun	Kolaborasi	Judul Kegiatan
1	2019	PT. Industri Karet Nusantara (IKN)	Pemanfaatan teknologi penentuan umur simpan (masa kadaluarsa) Resiprene-35 dan teknologi peningkatan kecerahan Resiprene-35
2	2019	PTPN IX	Penggunaan kajian dan rekomendasi terkait pemanfaatan Ruang Eks Pengereng BrCr di Kebun Merbuh untuk Peternakan Ayam Closed House dikaitkan dengan Sistem Manajemen Lingkungan
3	2020	PT. YPTI	Pembuatan Prototype Rubber Dumper Jok Mobil untuk Difabel kolaborasi
4	2020	UPT Industri Kulit dan Produk Kulit Magetan	Penanganan limbah cair kolaborasi
5	2021	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula	Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor
6	2022	PT. YPTI	Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel
7	2023	CV Northy dan UII	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy
8	2023	PT Inastek dan ATMI Solo	Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration sebagai Komponen Antropometer untuk Pendeteksi Stunting

**b. Pemanfaatan teknologi industri dalam rangka pengembangan industri**

Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. BBSPJIKKP menyediakan jasa konsultasi pemanfaatan teknologi melalui penerapan hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi yang dimanfaatkan oleh industri. Pada tahun 2019-2023, hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP ditampilkan pada tabel 3.

Tabel 2.3. Hasil optimalisasi pemanfaatan teknologi BBSPJIKKP TA 2019-2023

No	Tahun	Judul Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Nama Perusahaan Industri/Badan Usaha yang Menerapkan
1	2019	Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing sebagai Kompos	PT Usaha Loka
2	2019	Teknologi Chrome Recovery	PT Adi Satria Abadi
3	2020	Implementasi Mesin Pengikis Mutiara Kulit Ikan Pari	Zazmi Leather
4	2020	Penerapan Alat Chrome Recovery	PT. Adi Satria Abadi
5	2021	Optimalisasi Mesin Vulkanisir Ban Sepeda Motor	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Sula

No	Tahun	Judul Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Nama Perusahaan Industri/Badan Usaha yang Menerapkan
6	2022	Pembuatan Rubber Dumper Jok Mobil Untuk Difabel	PT. YPTI
7	2023	Penguatan Industri melalui Optimalisasi Teknologi di IKM CV Northy	CV Northy dan UII
8	2023	Pengembangan Produk Rubber Anti Vibration sebagai Komponen Antropometer untuk Pendeteksi Stunting	PT Inastek dan ATMI Solo

Tabel 2.4. Perbandingan capaian peningkatan efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan produk inovasi/paten hasil Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi TA 2019-2021

Indikator Kinerja	2019	2020	2021
Efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan hasil riset/inovasi BBSPJIKKP	99,7%	30,5%	-

**c. Pemanfaatan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI**

BBSPJIKKP menyediakan jasa konsultasi melalui pelaksanaan Program Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) sebagai sarana dalam meningkatkan kapabilitas sektor IKM. Perkembangan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI selama TA 2022-2023. ditunjukkan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perkembangan produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi DAPATI TA 2022-2023

Indikator Kinerja	2022	2023
Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	61,12%	

Pada tahun 2022 terdapat 2 (dua) industri yang mendapatkan layanan jasa konsultansi DAPATI yaitu IKM Djoen Leather dan PT Yutaka Asia Indonesia. Pada tahun 2023 terdapat 2 (dua) industri yang mendapatkan layanan jasa konsultansi DAPATI yaitu CV PSM dan UD Berkah. Rincian kegiatan DAPATI Tahun 2022-2023 ditampilkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rincian Kegiatan DAPATI TA 2022-2023

No	Tahun	Perusahaan/Industri	Judul Kegiatan	Efisiensi
1	2022	IKM Djoen Leather	Perancangan Desain Layout Area Produksi Dan Showroom	5,57%
2	2022	PT Yutaka Asia Indonesia	Pemanfaatan Limbah Sarung Tangan Karet menjadi Produk Karet Lembaran	116,67%
3	2023	CV PSM	Peningkatan Mutu Produk Melalui Pemantauan Proses Produksi	
4	2023	UD Berkah	Jasa Konsultansi Teknis Teknologi Pemanfaatan Limbah Fleshing Kulit	

### 3. Layanan Jasa Teknis Industri

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, BBSPJIKKP memberikan layanan jasa teknis kepada masyarakat dan industri. Hasil dari layanan yang diberikan ini akan menghasilkan penerimaan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama 5 tahun terakhir jumlah

penerimaan BBSPJIKKP selalu mengalami pertumbuhan yang positif, kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 (Tabel 2.7).

Tabel 2.7. Realisasi PNBP BBSPJIKKP TA 2018-2023

Layanan	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
Penelitian Dan Pengembangan**	109.580.000	0	14.968.807	0	0	0
Pendampingan Teknis/Pelatihan	446.461.000	779.840.000	293.365.000	236.895.000	464.234.000	679.830.100
Pengujian	897.811.812	931.158.050	412.414.755	410.822.744	750.832.150	603.137.750
Kalibrasi	124.200.065	112.036.500	110.215.000	97.611.000	168.513.200	213.527.000
Uji Profisiensi	-	-	-	-	-	95.495.000
Inspeksi	-	-	-	-	-	335.831.000
Validasi Verifikasi Gas Rumah Kaca (VV GRK)	-	-	-	-	-	15.750.000
Sertifikasi	3.261.395.000	3.203.850.000	1.976.682.000	2.776.422.000	2.624.100.000	2.998.127.000
Konsultansi	21.930.000	-	-	24.900.000	-	94.960.000
Miniplant Kulit	-	-	-	-	-	189.703.625
Miniplant Karet	-	-	-	-	-	117.218.118
Audit Teknologi						25.000.000
JPT Lainnya	216.864.530	161.646.600	31.344.725	38.192.359	228.539.807	10.195.000
<b>T O T A L</b>	<b>5.078.242.407</b>	<b>5.188.531.150</b>	<b>2.838.990.287</b>	<b>3.774.264.959</b>	<b>4.207.051.331</b>	<b>5.378.774.593</b>
<b>TARGET</b>	<b>6.164.180.000</b>	<b>5.491.000.000</b>	<b>6.041.000.000</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.250.000.000</b>
<b>% REALISASI</b>	<b>82,38%</b>	<b>94,49%</b>	<b>47,00%</b>	<b>55,15%</b>	<b>84,14%</b>	<b>102,45%</b>

\*Per 30 November 2023



Perkembangan jumlah pelanggan BBSPJIKKP dan jumlah volume layanan selama tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel 2.8 dan tabel 2.9.

Tabel 2.8. Jumlah Pelanggan TA 2017 – 2021

No	Jenis JPT	Jumlah Pelanggan						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1	Riset	3	2	3	1	0	0	0
2	Pelatihan	21	35	30	28	17	15	32
3	Pengujian	242	384	376	303	199	204	156
4	Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	32	51
5	Inspeksi	0	0	0	0	0	1	9
6	LVV GRK	0	0	0	0	0	1	1
7	TKDN	0	0	0	0	0	0	
8	Kalibrasi	40	46	44	49	48	52	68
9	Konsultansi	2	2	0	2	2	5	1
10	Sertifikasi	115	125	127	89	113	79	94
11	RBPI	0	0	0	0	0	0	0
	Miniplant Kulit	0	0	0	0	0	0	89
	Miniplant Karet	0	0	0	0	0	0	9
12	Jasa lainnya	38	93	35	143	107	119	74
	<b>Total</b>	461	687	615	615	486	508	584

\*)per bulan Oktober 2023

Tabel 2.9. Volume Layanan Jasa BBSPJIKKP Tahun 2018-2023

Jenis layanan	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023*
1. Litbang	MoU	2	3	1	-	-	-
2. Pendampingan (pelatihan)	Orang peserta	513	504	769	879	254	295
3. Pengujian	Contoh/Sampel	2.558	3.544	1.359	1.566	1.750	2.228
4. Konsultansi	Jumlah konsultansi	2	-	2	2	5	1
5. Kalibrasi	Alat	620	608	543	373	586	600
6. Sertifikasi							

Jenis layanan	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 *
a) Sistem Manajemen Mutu	Pelanggan/industry	102	97	99	97	106	102
b) SPPT SNI	Pelanggan/industry	113	123	122	119	104	104
c) Sistem Manajemen Lingkungan	Pelanggan/industry	31	37	42	45	48	50
d) SMK3	Pelanggan/industry	-	-	1	7	8	11
e) Industri Hijau	Pelanggan/industry	1	-	1	-	5	5
f) Halal	Pelanggan/pelaku usaha	-	-	-	-	14	236
7. Miniplant kulit	Pelanggan/industry	-	-	-	-	-	83
8. Miniplant karet	Pelanggan/industry	-	-	-	-	-	7
9. Uji Profisiensi	Pelanggan/industry	-	-	-	-	8	35
10. Inspeksi	Pelanggan/industry	-	-	-	-	1	9
11. Validasi Verifikasi GRK dan TKDN	Pelanggan/industry	-	-	-	-	1	126
12. Audit Teknologi	Pelanggan/industry	2	3	1	-	-	-
13. Jasa Lainnya	Kegiatan	93	35	142	107	85	20

\*Per bulan Oktober 2023

## B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menyebutkan bahwa struktur perekonomian nasional diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, dan pertambangan dalam arti luas yang menghasilkan produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik serta ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Hal-hal yang mendorong pengembangan perindustrian mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- 7) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM

yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 melalui pencapaian tiga aspirasi utama yaitu peningkatan porsi *net* ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. Fokus pengembangan industri pada periode tahun 2020–2024 merupakan tahap II dari pembangunan industri nasional dengan arah rencana pembangunan industri nasional pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguatan teknologi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dengan uraian sebagai berikut.

1. Penguatan Struktur Industri dilaksanakan melalui:

- a. Perbaiki alur material melalui pembangunan industri hulu;
- b. Memperkuat iklim investasi dan keterbukaan perdagangan dalam rantai nilai produksi global;
- c. Menarik investasi asing melalui insentif dan kolaborasi untuk percepatan transfer teknologi;
- d. Perbaiki desain zona industri nasional; dan
- e. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) melalui dukungan pengembangan kompetensi, pengembangan ekosistem bisnis, kelembagaan dan penyediaan fasilitas.

2. Penguasaan Teknologi

- a. Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;

- b. Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- c. Membangun infrastruktur digital nasional; dan
- d. Pengembangan standardisasi industri dan industri hijau.

3. Peningkatan Kualitas SDM

- a. Peningkatan kompetensi SDM Industri melalui pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi;
- b. Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi; dan
- c. Pembangunan dan pengembangan lembaga pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi

### **BAB III**

## **RENCANA KINERJA**

#### **A. Sasaran**

Dokumen Rencana Kinerja (Renkin) BBSPJIKKP yang disusun ini menyajikan indikator-indikator kinerja sasaran maupun kegiatan. Pada saat penyusunan, indikator kinerja yang ditetapkan merupakan indikator kinerja yang dianggap terbaik. Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh melalui pengalaman serta referensi-referensi tambahan, indikator-indikator yang tidak sesuai nantinya akan mengalami perubahan.

Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renkin diambil dari dokumen Renstra. Pada saat penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran yang dianggap terbaik. Namun demikian, seperti juga pada indikator kinerja, peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengakibatkan sasaran-sasaran yang ditetapkan menjadi kurang tepat dan perlu disempurnakan. Sasaran-sasaran tersebut mempunyai hubungan yang erat dalam kaitannya dengan tujuan masing-masing. Namun, sebagian sasaran berorientasi pada output dan lebih bersifat kegiatan.

Sebagai penjabaran dari perencanaan strategis, sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2024 beserta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Aktivitas/Komponen/Sub Komponen Pendukung

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung</b>
SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi</li> <li>- Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis</li> <li>- Diseminasi</li> </ul>
SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1. Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri</li> <li>- Jasa Pelayanan audit teknologi dan INDI 4.0</li> </ul>
	2. Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen/RBPI</li> <li>- Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal</li> </ul>
SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa pelayanan konsultansi teknis/manajemen/RBPI</li> </ul>
	2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Pengujian</li> <li>- Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi</li> <li>- Jasa Pelayanan sertifikasi profesi</li> <li>- Jasa pelayanan inspeksi teknis</li> <li>- Jasa pelayanan verifikasi gas rumah kaca</li> <li>- Jasa pelayanan uji profisiensi</li> </ul>

Sasaran Strategis	Indikator	Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal</li> <li>- Miniplant karet</li> </ul>
	3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi dalam Pameran/Promosi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium uji</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi laboratorium kalibrasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga sertifikasi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga inspeksi teknis</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga uji profisiensi</li> <li>- Pemeliharaan akreditasi lembaga pemeriksa halal</li> </ul>
	4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan kendaraan bermotor operasional</li> <li>- Pengadaan pralatan pengolahan data dan komunikasi</li> <li>- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran</li> <li>- Operasional dan Pemeliharaan Kantor</li> </ul>
SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan reformasi birokrasi/zona integritas/SPIP</li> <li>- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</li> </ul>
SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan</li> </ul>
KS6.	1. Rata-rata indeks	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan dan</li> </ul>



<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Aktivitas/Komponen/Sub komponen Pendukung</b>
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	profesionalitas ASN	Pengembangan Kompetensi SDM - Pembayaran gaji dan tunjangan
SK7. Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	- Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan - Pengelolaan data dan informasi - Pengelolaan Kearsipan
SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
	2. Nilai minimal laporan keuangan	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Pencapaian sasaran dari setiap program sangat penting untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai selama pelaksanaan program berjalan. Untuk mencapai sasaran secara optimal diperlukan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan dari suatu program yang baik.

BBSPJIKKP mempunyai rencana sasaran sebanyak 8 (delapan) sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2024, agar keempat sasaran tersebut dapat dicapai secara optimal maka diperlukan suatu perencanaan kegiatan yang baik. Untuk setiap sasaran diidentifikasi resiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran tersebut, dan dilakukan antisipasi untuk mengatasi resiko-resiko tersebut. Berikut ini identifikasi resiko dan antisipasi untuk mengatasinya :

Tabel 3.2. Identifikasi Resiko Dalam Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
1.	SK1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Pengembangan teknologi yang tidak efisien	- Melakukan survey layanan yang dibutuhkan oleh industri Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
2.	SK2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri	Pengembangan teknologi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman	- Melakukan pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat industri pada saat ini
3,	SK3. Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	Pengembangan teknologi yang tidak efisien	Melakukan pengembangan teknologi yang memberi nilai tambah dan dapat digunakan oleh industri
		2. Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama	- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima - Berusaha menambah sarana dan
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang		

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
		digunakan oleh pelanggan		prasarana yang mendukung peningkatan jumlah lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN
		4. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker	Penggunaan produk dalam negeri rendah	Meminimalisir penggunaan produk luar negeri
4.	SK4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Temuan internal belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti temuan hasil pengawasan
5.	SK5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan</li> <li>- Ketidakpuasan pelanggan</li> <li>- Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP</li> <li>- Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima</li> <li>- Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima</li> <li>- Promosi dan publikasi</li> <li>- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima</li> </ul>

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
6.	KS6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya motivasi SDM untuk meningkatkan kompetensinya</li> <li>- Rendahnya nilai disiplin pegawai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memotivasi SDM dan mengadakan pelatihan teknis internal</li> <li>- Memberi reward untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin tinggi dan memberi punishment untuk pegawai yang memiliki nilai disiplin rendah</li> </ul>
7.	SK7. Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada pelanggan</li> <li>- Ketidakpuasan pelanggan</li> <li>- Ketidaktahuan masyarakat industri atau instansi lain mengenai produk layanan BBSPJIKKP</li> <li>- Adanya pesaing pada layanan jasa teknis yang sama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima</li> <li>- Melakukan pelayanan publik yang profesional dan prima</li> <li>- Promosi dan publikasi</li> <li>- Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan yang prima</li> </ul>
8.	SK8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Kurang lengkapnya dokumen	Melengkapi dokumen pendukung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Resiko	Antisipasi
		2. Nilai minimal laporan keuangan	pendukung yang memenuhi standar dalam penilaian SAKIP dan laporan keuangan	untuk memenuhi standar penilaian SAKIP dan laporan keuangan

Dalam pencapaian sasaran program, BBSPJIKKP melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran program tersebut. Kegiatan-kegiatan dalam Rencana Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra BBSPJIKKP Tahun 2021 - 2024.

Kegiatan-kegiatan tersebut rencananya dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024 dengan rencana anggaran sebesar Rp.25.385.899.000.

Kegiatan-kegiatan BBSPJIKKP dikelompokkan dalam 2 (dua) program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (EC) dan Program Dukungan Manajemen (WA) dengan jumlah anggaran disesuaikan jika ada perubahan Pagu yang diberikan oleh BSKJI.

Adapun rencana kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan pada tahun 2024 sebagai komponen pada output dan sub output kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Rencana Kegiatan dan Anggaran BBSPJIKKP TA 2024

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
<b>EC</b>	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>		4.178.771.000
6077	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri		
AEC	Kerja sama		25.431.000
003	Kerjasama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		25.431.000
	051	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan layanan teknis	25.431.000
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi		281.934.000
005	Promosi/publikasi/ Temu Pelanggan/ Sosialisasi/ Diseminasi Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		281.934.000
	051	Partisipasi dalam pameran/promosi	116.941.000
	052	Diseminasi	53.177.000
	053	Survei Kepuasan Masyarakat Dan Temu Pelanggan	111.816.000
BAD	Pelayanan Publik Kepada Industri		2.994.312.000
007	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian Industri Kulit, Karet dan Plastik		622.857.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian	507.217.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Uji	55.640.000
015	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		260.460.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi	183.160.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi	77.300.000
027	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi Industri Kulit, Karet dan Plastik		1.295.113.000
	051	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi	1.094.873.000
	052	Jasa Pelayanan Sertifikasi Profesi	43.470.000
	053	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	156.500.000
039	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		118.042.000
	051	Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri	118.042.000
044	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi Teknis/Manajemen Industri Industri Kulit, Karet dan Plastik		85.860.000
	051	Jasa Pelayanan Konsultasi Teknis/Manajemen	85.860.000
085	Jasa Pelayanan Inspeksi Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik		195.980.000
	051	Jasa pelayanan inspeksi teknis	30.880.000

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Inspeksi Teknis	52.380.000
	053	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca	40.900.000
	054	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca	71.820.000
088	Jasa Penyelenggaraan Uji Profisiensi Industri Kulit, Karet dan Plastik		80.490.000
	051	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi	49.920.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Uji Profisiensi	30.570.000
089	Jasa pelayanan pemeriksa dan pengujian produk halal Industri Kulit, Karet dan Plastik		283.350.000
	051	Layanan pemeriksa dan pengujian produk halal	244.750.000
	052	Pemeliharaan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal	39.100.000
093	Jasa Pelayanan Proses dan Mesin Industri Kulit, Karet dan Plastik		51.660.000
	051	Miniplant Karet	22.908.000
	052	Miniplant Kulit	28.752.000
BDI	Fasilitasi Dan Pembinaan Industri		67.388.000
005	Pemanfaatan Teknologi Industri Kulit, Karet dan Plastik		67.388.000
	051	Pemanfaatan Paket Teknologi/supervisi/konsultasi	67.388.000
CAH	Sarana Bidang Industri Dan Perdagangan		503.496.000
006	Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan BBSPJIKKP		503.496.000
	051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Laboratorium/workshop/layanan	503.496.000
PDA	Standarisasi Produk		306.210.000
001	Bahan Acuan Standar		306.210.000
	051	Pengembangan bahan acuan standar (standard reference material) berbasis karet dan Lembaga Produsen Bahan Acuan	306.210.000
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>21.207.128.000</b>
6042	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Penelitian Dan Pengembangan Industri		<b>21.207.128.000</b>
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		20.064.733.000
958	Layanan Hubungan Masyarakat		143.229.000
	051	Pengelolaan Data dan Informasi	143.229.000
994	Layanan Perkantoran		19.921.504.000
	001	Gaji dan Tunjangan	14.666.372.000
	002	Operasional Dan Pemeliharaan Kantor	5.255.132.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		564.845.000
	053	Pengadaan peralatan inventaris perkantoran	564.845.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		500.000.000
996	Layanan Pendidikan Dan Pelatihan		500.000.000
	051	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM	500.000.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		77.550.000

Kode	Kegiatan/ Output/Sub Output/Komponen	Sub Komponen	Anggaran (Rp)
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		17.160.000
	051	Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran	17.160.000
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		13.420.000
	052	Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi	13.420.000
955	Layanan Manajemen Keuangan		25.000.000
	051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	25.000.000
961	Layanan Reformasi Kinerja		11.460.000
	051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/Zona Integritas/SPIP	11.460.000
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		10.510.000
	051	Penyelenggaraan Kearsipan	10.510.000
<b>TOTAL</b>			<b>25.385.899.000</b>

## B. Indikator Kinerja

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai, maka ditetapkanlah ukuran untuk menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran tersebut melalui penetapan indikator kinerja. Berikut ini indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BBSPJIKKP Tahun 2024.

Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja TA 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (IKU)	7 Persen
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0 (IKU)	2 Perusahaan
	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industry (IKU)	3 Perusahaan
Meningkatnya Kemampuan Industri	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri	7 Persen



Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
Barang dan Jasa Dalam Negeri	yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (IKU)	
	Meningkatnya PNBP layanan jasa industri (IKU)	23 Persen
	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh industri (IKU)	5 Persen
	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa (IKU)	80 Persen
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100 Persen
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks 3,85
Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks 81
Penguatan Layanan Publik	Nilai minimal indeks layanan publik	Nilai 3,7
Penguatan Akuntabilitas Organisasi	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai 80,1
	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai 92

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja (Renkin) Tahun 2024 disusun mengacu pada sasaran dan program yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024. Penyusunan Renkin ini adalah merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima dari program lima tahun yang akan ditetapkan dalam Renstra Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik Tahun 2021 - 2024. Rencana rincian kegiatan dan keluaran yang ingin dilaksanakan diarahkan guna meningkatkan daya saing industri kulit, karet dan plastik.

Dengan demikian Renkin ini merupakan bentuk komitmen penuh Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik dalam rencana mencapai kinerja sebaik-baiknya sebagai bagian dari upaya memenuhi misinya dan seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2024 ini.

# L A M P I R A N

### FORMULIR RENCANA KINERJA

Unit Organisasi Eselon II : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa  
Industri Kulit, Karet dan Plastik

Tahun Anggaran : 2024

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Target	Satuan
1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	7	Persen
2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0.	2	Perusahaan
		2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	3	Perusahaan
3	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	7	Persen
		2	Meningkatnya PNBPN layanan jasa industri	23	Persen
		3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa yang digunakan oleh pelanggan	5	Persen
		4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	80	Persen
4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	100	Persen

No.	Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja	Target	Satuan
5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,85	Indeks
6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	81	Indeks
7	Penguatan Layanan Publik	1	Nilai minimal indeks layanan publik	3,7	Indeks
8	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	80,1	Nilai
		2	Nilai minimal laporan keuangan	92	Nilai



Yogyakarta, Oktober 2023

Kepala,

Hagung Eko Pawoko

MATRIKS KETERKAITAN AKTIVITAS UTAMA DENGAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Progra m/ Kegiata	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet dan Plastik</b>						23.42	22.67	23.10	23.62	25.38		
<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing</b>												
<b>Pengembangan dan Penyelenggaraan Industri</b>												
<b>SK 1. Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>												
1	Produktivitas /efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	Persen	N/A	N/A	6	7						- Kolaborasi Dalam Rangka Pengembangan Industri Karet - Kegiatan PINOTI
<b>SK 2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>												
1	Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0	Perusahaan	0	0	2	2						Jasa pelayanan audit teknologi
2	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri	Perusahaan	2	3	2	3						Jasa pelayanan konsultasi teknis/manajemen
<b>SK 3. Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri</b>												
1	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi	Persen	N/A	5	6	7						Kegiatan DAPATI
2	Meningkatnya PNPB layanan jasa industri	Persen	5	5	20	23						Layanan Pengujian, Kalibrasi, Uji Profisiensi, Sertifikasi, Sertifikasi Profesi, Pemeriksa dan Pengujian Halal, Penyedia Material Acuan Standar, Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri, Validasi dan Verifikasi Gas Rumah Kaca, Inspeksi Teknis
3	Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	Persen	N/A	N/A	5	7						- Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis Industri Kulit, Karet dan Plastik - Partisipasi dalam pameran/ promosi - Diseminasi
4	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	72	75	78	80						- Operasional dan Pemeliharaan Kantor - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi - Pengadaan peralatan inventaris perkantoran
<b>SK 4. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien</b>												
1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	100	100	100	100						Penerapan SPIP
<b>SK 5. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>												
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,7	3,75	3,8	3,85						Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan
<b>SK 6. Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>												
1	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81						- Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM - Pembayaran gaji dan tunjangan
<b>SK 7. Penguatan Layanan Publik</b>												

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	Satuan	Indikasi Target				Indikasi Pendanaan (dalam milyar rupiah)					Aktivitas Utama
			2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	3.01	3.51	3.6	3.7						- Pembuatan Sistem Informasi Training Center dan Sertifikasi Profesi BBSPJIKKP - Penyelenggaraan Kearsipan - Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan
<b>SK 8. Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>												
1	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	82	82,3	82,6	82,9						- Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi - Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
2	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	90	90	90	91						Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BBSPJIKKP TAHUN 2021-2024

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik</b>				22.675,61		23.081,42		23.628,75		23.569,55
<b>SK.1</b>	<b>Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas</b>									
<b>SK.1.1</b>	<b>Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk</b>	<b>Tenan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	
A	Pemanfaatan paket teknologi/ supervisi/ konsultasi			73,61		90,00				
<b>SK.1.2</b>	<b>Peningkatan Kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>N/A</b>		<b>N/A</b>	
A	Partisipasi dalam Pameran/Promosi			75,53		58,09				
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi									
C	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan teknologi dan Layanan Teknis			29,90		29,90				
D	Pengusulan hasil litbangyasa untuk dipatenkan			40,02						
E	Jasa pelayanan konsultasi teknis/ manajemen/ RBPI*									
F	Pemeliharaan Akreditasi Pranata Litbang			13,32						
G	Penerapan hasil litbangyasa			92,58						
H	Kajian Awal Kelayakan Teknologi Pengembangan Produk Kulit, Karet, dan Plastik			76,33						
I	Pengelolaan Majalah/Jurnal Ilmiah dan Publikasi KTI			95,27						
<b>SK.1.3</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi</b>	<b>Persen</b>	<b>N/A</b>		<b>N/A</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Diseminasi						48,84		80,00	
B	Pemanfaatan paket teknologi/supervisi/konsultasi						33,15		70,00	
c	Penjajakan Kerjasama pemanfaatan						20,00		30,00	



KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
	teknologi dan Layanan Teknis									
<b>SK.2</b>	<b>Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0</b>									
<b>SK.2.1</b>	<b>Peningkatan peran balai dalam penerapan industri 4.0 dan/atau standardisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>5</b>	
A	Jasa Pelayanan Pelatihan Teknis			121,19		110,00				
B	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri									
C	Analisis, penerapan dan pengawasan standardisasi industri									
<b>SK.2.2</b>	<b>Perusahaan yang terfasilitasi industry 4.0</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2</b>		<b>2</b>	
A	Jasa pelayanan pendampingan dan assemen INDI 4.0									30,00
<b>SK.2.3</b>	<b>Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standarisasi industri</b>	<b>Perusahaan</b>	<b>2</b>		<b>3</b>		<b>2</b>		<b>3</b>	
A	Jasa Pelayanan bimbingan dan pendampingan teknis Industri							80,00		100,00
<b>SK.3</b>	<b>Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri</b>									
<b>SK.3.1</b>	<b>Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>6</b>		<b>7</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Konsultasi			50,30		50,30		60,00		70,00
<b>SK.3.2</b>	<b>Meningkatnya PNPB layanan jasa industri</b>	<b>Persen</b>	<b>5</b>		<b>5</b>		<b>40</b>		<b>50</b>	
A	Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi			198,11		723,12		588,34		700,00
B	Jasa Pelayanan Teknis Pengujian			516,74		400,00		344,96		400,00
C	Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi			216,34		183,54		82,17		85,00
D	Kaji ulang dokumen SNI			73,39		12,34				
E	Jasa pelayanan sertifikasi profesi							31,50		33,00
F	Jasa pelayanan inspeksi teknis							70,00		75,00
G	Jasa pelayanan validasi dan verifikasi gas rumah kaca							52,58		60,00
H	Jasa Pelayanan Uji Profisiensi							32,40		35,00



KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
<b>SK.4.1</b>	<b>Nilai minimal indeks manajemen resiko</b>	<b>Nilai</b>	<b>3</b>		<b>3</b>		<b>4</b>		<b>4</b>	
A	Penerapan SPIP			18,60		12,65		15,00		20,00
<b>SK.4.2</b>	<b>Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker</b>	<b>Persen</b>	<b>91,5</b>		<b>92</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	
A	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			21,98		15,00		15,00		20,00
<b>SK.5</b>	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan</b>									
<b>SK.5.1</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,70</b>		<b>3,75</b>		<b>3,80</b>		<b>3,85</b>	
A	Pembangunan / Renovasi Gedung dan Bangunan			548,47		365,00				
B	Survei Kepuasan Masyarakat dan Temu Pelanggan			60,66		60,66		41,84		100,00
<b>SK.6</b>	<b>Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional</b>									
<b>SK.6.1</b>	<b>Rata-rata indeks profesionalitas ASN</b>	<b>Indeks</b>	<b>74</b>		<b>76</b>		<b>78</b>		<b>81</b>	
A	Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM			358,80		283,77		320,00		500,00
B	Pembayaran Gaji Dan Tunjangan							14.823,26		15.231,24
<b>SK.6.2</b>	<b>Nilai Disiplin Pegawai</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			14.326,41		14.880,70				
<b>SK.7</b>	<b>Penguatan Layanan Publik</b>									
<b>SK.7.1</b>	<b>Nilai Minimal Indeks Layanan Publik</b>	<b>Indeks</b>	<b>3,01</b>		<b>3,51</b>		<b>3,60</b>		<b>3,70</b>	
A	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi			109,29		10,00				
B	Pengadaan peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan			440,27		235,50		635,63		4.050,00
C	Pengelolaan data dan informasi			141,76		120,69		121,00		130,00
D	Pengelolaan Kearsipan			13,34		13,34		15,00		15,00
<b>SK.8</b>	<b>Penguatan Akuntabilitas Organisasi</b>									
<b>SK.8.1</b>	<b>Nilai Minimal Akuntabilitas Kinerja</b>	<b>Nilai</b>	<b>82,0</b>		<b>82,3</b>		<b>82,6</b>		<b>82,9</b>	
A	Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran			37,38		20,00		15,00		20,00
<b>SK.8.2</b>	<b>Nilai Minimal Laporan Keuangan</b>	<b>Nilai</b>	<b>90</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>	

KODE	KEGIATAN / SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR SASARAN KEGIATAN/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN	SATUAN	TARGET DAN PEMBIAYAAN							
			2021		2022		2023		2024	
			TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA	TARGET	RP. JUTA
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			25,70		25,70		20,00		25,00

